



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDA ANANDA
2. Jabatan : PJ. WALIKOTA
3. NHK : 216627

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.195.585.000

1. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 191.680.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 277.700.000
4. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 207.740.000
5. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 44.400.000
6. Tanah Seluas 7157 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL
SENDIRI Rp. 322.065.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 258.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 515.150.404



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.968.735.404
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.968.735.404

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.